Bapenda juara

RENJA - P 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun untuk menyesuaikan perencanaan tahunan perangkat daerah terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi, baik dari sisi internal maupun eksternal dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Blitar, yakni **"**Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Berdaya dan Berjaya**".** Dengan demikian, dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Blitar, 15 Juli 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

ASMANINGAYU DEWI L,. S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	4
	1.1. Latar Belakang	4
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan Tujuan	9
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
	2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Capaian Bapenda	11
	2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapenda Kabupaten Blitar	14
	2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I	17
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB IV	PENUTUP	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja merupakan proses penyesuaian dan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan sehingga disesuaikan untuk menanggapi dinamika kebijakan, kondisi faktual, serta perubahan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perubahan rencana kerja perlu juga disesuaikan perubahan rencana pencapaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bapenda untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam prosesnya, penyusunan perubahan rencana kerja merupakan merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang bersifat dinamis**.** Oleh karena itu, substansi dari penyusunan perubahan Renja adalah penyesuaian terhadap program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi pelaksanaan, serta alokasi anggaran perangkat daerah, yang disusun berdasarkan perubahan arah kebijakan, prioritas pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, dan perubahan kondisi yang bersifat strategis maupun operasional.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar perlu Menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahunan dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2021 – 2026, namun tetap realistis dan sesuai dengan kondisi existing saat ini.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimulai dengan identifikasi terhadap perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, dan kondisi aktual pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi setelah penetapan Renja awal. Identifikasi ini mencakup evaluasi

terhadap capaian kinerja, realisasi anggaran, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Selanjutnya Bapenda melakukan penelaahan terhadap dokumen RKPD Perubahan dan kebijakan nasional maupun daerah yang berdampak langsung terhadap perencanaan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan Renja yang mencakup penyesuaian program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan alokasi anggaran. Rancangan tersebut kemudian dikonsultasikan dengan Bappeda untuk sinkronisasi dan penyelarasan secara lintas perangkat daerah, sebelum ditetapkan menjadi dokumen Perubahan Renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dilaksanakannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai respon atas adanya perubahan kebijakan, kondisi, dan kebutuhan pembangunan yang berkembang, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan perubahan Renja adalah sebagai berikut:

1. **Menyesuaikan dengan perubahan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan**, agar perencanaan di tingkat perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. **Mengakomodasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan**, termasuk realisasi anggaran, capaian kinerja, serta hambatan atau kendala teknis dan non-teknis.

3. **Menyesuaikan alokasi anggaran** terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan, baik karena adanya perubahan pagu indikatif, efisiensi, maupun kebutuhan mendesak.
4. **Menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran**, sehingga dokumen Rencana Kerja menjadi dasar yang sah dan logis dalam penyusunan RKA Perubahan serta APBD Perubahan.
5. **Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah**, agar pelaksanaan kegiatan tetap tepat sasaran, bermanfaat, dan adaptif terhadap perubahan situasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Analasis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2025, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKU, IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
2. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Pendapatan yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penetapan dan penertiban data potensi, serta pengendalian dan pelaporan penerimaan PAD secara berkala;
3. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Pendapatan Daerah yang perlu ditindaklanjuti;
5. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD;

6. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;
7. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan. Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Bapenda Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Badan Pendatan Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Analisis
1	Skor AKIP	Nilai BB atau Lebih (Kemenpan)	Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan LHE AKIP	BB	73,10	74,00	75,00	BB	BB (73,10)	BB (74,00)	BB (75,00)	
2	Persentase Peningkatan PAD	N/A	Pertumbuhan Tahunan PAD	-2,62	9,95	23,33	2,50	3,00	3,25	3,50	4,00	
3	Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	N/A	Kontribusi Pajak terhadap PAD	31,25	44,69	44,74	44,75	31,25	30,35	44,69	44,74	
4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	N/A	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,36	17,03	21,54	21,73	16,36	17,03	21,54	21,73	

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

2.2.1 Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatkan profesionalisme petugas juga kualitas sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan maksimal sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas dan fungsingnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ada yaitu :

a. Sistem Pelayanan dan Pembayaran Online yang masih belum maksmimal.
b. Potensi pajak daerah yang masih belum tergali secara maksimal pada beberapa jenis pajak utamanya MBLB.
c. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat utamanya wajib pajak dalam membayar pajak
d. Komunikasi dan Koordinasi yang belum maksimal dengan beberapa OPD penghasil.
e. Belum Optimalnya penagihan piutang terutama PBB-P2 yaitu ditandai dengan semakin bertambahnya nilai Piutang Pajak Daerah.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

Dengan adanya beberapa permasalahan dan hambatan tersebut tentunya akan sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karenanya Badan Pendapatan Daerah terus berupaya melihat Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Layanan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Blitar. Adapun Tantangan yang ada dalam Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah :

a. Sistem aplikasi dan jaringan yang terkadang masih ada kendala, merupakan salah satu tantangan yang harus segera di tindak lanjuti.
b. Beberapa potensi daerah yang sebenarnya sudah dapat terpetakan, hanya kesulitannya muncul dari wajib pajak itu sendiri.
c. Piutang yang semakin meningkat jikat tidak ditindaklanjuti.
d. Potensi daerah yang belum tergali secara optimal.

Lalu Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal Badan Pendapatan Daerah yang berpotensi menguntungkan Badan Pendapatan Daerah dan perangkat daerah lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Peluang dimaksud terdiri dari:

a. Jumlah Penduduk yang cukup banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi objek pajak.
b. Luas wilayah sehingga banyak potensi pajak yang masih dapat digali lebih maksimal lagi.
c. Kabupaten Blitar mempunyai sumber alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil peternakan, perikanan, hasil tambang (Mineral Bukan Logam dan Batuan), serta pariwisata sejarah yang mempunyai nilai, dan jika di maksimalkan akan menghasilkan PAD yang sangat luar biasa.
d. Perkembangan Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
e. Adanya Kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik vertical maupun horizontal.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan Badan Pendapatan Daerah , maka dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pendapatan Daerah dalam oerientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program pemerintah Kabupaten Blitar 2025 – 2030.

Bertolak pada identifikasi permasalahan, visi, misi, serta arah kebijakan kepala daerah, hasil Analisa Renstra, maka beberapa hal yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah :

a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
b. Optimalisasi kualitas database potensi pajak daerah
c. Optimalisasi pelayanan pajak daerah
d. Optimalisasi kolaborasi antar instansi terkait
e. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah.
f. Optimalisasi Pajak MBLB

Dari berbagai poin strategi yang telah dilaksanakan, masih terdapat satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Sebagai langkah awal optimalisasi Pajak MBLB, Bapenda telah melakukan studi tiru ke beberapa daerah yang memiliki potensi Pajak MBLB yang besar, antara lain Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Karangasem. Hasil kunjungan dan observasi

menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak MBLB melalui penerapan pola pengawasan yang efektif melalui perubahan tata cara pemungutan Pajak MBLB.

Pola tersebut dilakukan dengan membangun pos-pos pengawasan pada titik-titik strategis yang menjadi jalur angkutan hasil tambang MBLB. Dengan adanya pos pengawasan ini, aktivitas pengangkutan mineral dapat diawasi secara langsung, sehingga volume yang dilaporkan lebih mendekati realita.

Berdasarkan hasil studi tiru tersebut, Bapenda menerapkan pola serupa, dengan menyesuaikan kondisi wilayah Kabupaten Blitar. Saat ini, tata cara pemungutan Pajak MBLB yang baru melalui pemasangan pos-pos pengawasan di beberapa titik strategis sudah mulai dilaksanakan per tanggal 1 Juli 2025. Selain pembangunan pos pengawasan, juga sudah dilaksanakan penambahan tenaga pendukung (outsourcing) yang ditempatkan di pos-pos tersebut untuk mendukung pengawasan lapangan.

Diharapkan dengan penerapan pola pengawasan yang lebih ketat ini, potensi dan realisasi penerimaan Pajak MBLB di Kabupaten Blitar dapat meningkat secara signifikan, serta kebocoran pendapatan dapat ditekan menjadi seminimal mungkin.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan I dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian target. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang sudah ditentukan dalam perencanaan strategis. Evaluasi

Kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada capaian target dan Indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya, Kinerja Badan Pendapatan Daerah bisa diketahui Berdasarkan capaian target penerimaan pajak daerah sebagai berikut :

TABEL REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	11.145.443.783,00	1.152.201.806,00	10,34
2	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	15.518.721.416,00	284.381.140,00	1,83
TOTAL		26.664.165.199,00	1.436.582.946,00	5,39

Capaian Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar 5,39% atau sebesar Rp 1.436.582.946,00 dari total pagu anggaran 26.664.165.199,00. Jika dilihat dari capaian belanja masih jauh dari target, hanya memang secara mapping belanja banyak kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Berikut Capaian Realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan.
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daera
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 20%, terealisasi sebanyak 37 Orang dari target sebanyak 44 Orang ASN yang mutasi maupun pensiun.
   b) Sub Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 84%, terealisasi sebanyak 37 Orang dari target sebanyak 44 Orang ASN. Hal ini dikarenakan terdapat ASN yang mutasi maupun pensiun.
2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      Sub Kegiatan ini mencapai target persentase 20%, terealisasi sebanyak 1 Jenis dari target sebanyak 5 Jenis. Hal ini dikarenakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor masih terealisasi 1 paket.
   b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 8%, terealisasi sebanyak 1 Jenis dari target sebanyak 12 Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
   c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 50%, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 2 Paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini belum menggunakan anggaran untuk penyediaan bahan logistik kantor dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 20%, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 5 Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 25%, terealisasi sebanyak 1 Paket dari target sebanyak 4 Paket bahan bacaan yang disediakan.

g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 2 Laporan dari target sebanyak 8 Laporan yang dilaksanakan sehingga masih tercapai sebesar 25%. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut belum cukup sering mengundang wajib pajak untuk pemeriksaan maupun klarifikasi.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini belum menggunakan anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 25%, terealisasi sebanyak 3 laporan dari target sebanyak 12 laporan surat menyurat.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase sebesar 25%, terealisasi 3 laporan dari target 12 laporan yang dibayarkan.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 25%, terealisasi sebanyak 3 laporan dari target sebanyak 12 laporan.

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 33%, terealisasi sebanyak 3 unit dari target sebanyak 9 unit kendaraan dinas yang dipelihara.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase sebesar 40%, terealisasi sebanyak 2 unit dari target sebanyak 5 unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini belum ada yang terealisasi untuk belanja pemeliharaan gedung kantor.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini belum menggunakan anggaran untuk perencanaan pengelolaan pajak daerah dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

b) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 50%, terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 2 dokumen.

c) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 22 laporan dari target 22 laporan.

d) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 50%, terealisasi sebanyak 1 Laporan dari target 2 Laporan.

e) Sub Kegiatan Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 50%, terealisasi sebanyak 1 laporan dari target 2 laporan.

f) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 10 laporan dari target 10 laporan berdasarkan Jenis Data Pajak yang dilakukan dalam pengolahan dan pemeliharaan.

g) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   Sub Kegiatan ini baru akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.

h) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

   Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 811.580 Dokumen dari target sebanyak 811.580 Dokumen dengan jumlah Dokumen ketetapan pajak daerah.

i) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

   Sub kegiatan ini sudah mencapai 20%, terealisasi sebanyak 10 layanan yang sudah teratasi dari target 1500 layanan.

j) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

   Sub Kegiatan ini sudah mencapai target dengan persentase 100%, terealisasi sebanyak 811.580 Wajib Pajak dari target sebanyak 811.580 Wajib Pajak yang tertagih.

k) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

   Sub Kegiatan ini terealisasi sebanyak 50 dokumen dengan target sebanyak 375 dokumen yang dikeluarkan sehingga masih tercapai 50%. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dan pengawasan yang masih dalam proses.

l) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sub Kegiatan ini sudah mencapai target persentase 25%, terealisasi sebanyak 1 Laporan dengan target sebanyak 4 Laporan koordinasi yang dilakukan.

m) Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan ini belum menggunakan anggaran dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

2. Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Pada triwulan I ini belum ada target kinerja yang melebihi target yang diharapkan, karena memang secara perencanaan kinerja, banyak kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II, III, dan IV.

4. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu :
   - Surat Edaran terkait Efisiensi Nasional
   - Rata-rata Kegiatan Bapenda berjalan pada Triwulan II, III dan IV karena memerlukan tahap persiapan ;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Pendapatan Daerah

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
   a. Memperbaiki Pola Penjadwalan Kegiatan
   b. Penyusunan Rencana Kerja yang lebih realistis

c. Penguatan Proses Penganggaran
   - Pastikan belanja mendukung kegiatan prioritas yang strategis
   - Belanja Operasional Penting seperti (dukungan teknis, sarpras) dianggarkan lebih awal

d. Monitoring dan evaluasi secara berkala

Jika memang sampai dengan akhir triwulan II kegiatan masih tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang seharusnya, maka perlu dipikirkan untuk proses pergeseran pada perubahan anggaran agar dilakukan revisi terhadap indikator kinerja yang terdapat dalam renstra.

Karena Bapenda mengampu Pendapatan, maka berikut disampaikan juga Capaian Pajak Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

TABEL REALISASI PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pajak Reklame	700.000.000,00	194.846.138,00	27,84
2	Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000,00	129.381.401,00	43,13
3	Pajak MBLB	655.500.000,00	54.905.840,40	8,38
4	PBB-P2	46.317.798.087,00	4.617.703.410,00	9,97
5	BPHTB	27.669.455.430,50	4.384.036.883,94	15,84
6	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.250.000.000,00	928.637.523,35	17,69
7	PBJT-Tenaga Listrik	52.000.000.000,00	13.000.255.156,00	25,00
8	PBJT-Jasa Perhotelan	244.800.000,00	51.801.563,00	21,16
9	PBJT-Jasa Parkir	225.000.000,00	36.920.963,00	16,41
10	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.130.000.000,00	377.273.812,00	17,71
11	OPSEN PKB	88.846.830.265,00	19.318.389.350,00	21,74
12	OPSEN BBNKB	25.132.454.486,00	8.036.441.900,00	31,98
TOTAL		249.471.838.268,50	51.130.593.940,69	20,50

Capaian penerimaan Pajak Daerah pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 20,50% dimana indikator pengukuran berasal dari perhitungan target sebesar Rp 249.471.838.268,50 sedangkan realisasi target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sebesar Rp 51.130.593.940,69. Dilihat dari capaian tersebut, target penerimaan pajak daerah sudah "***Melebihi Target***" sesuai dengan rencana aksi yang diharapkan. Namun masih ada 1 Pajak Daerah yang belum sesuai dengan Target yang diharapkan yaitu Pajak MBLB, yang penjelasannya kenapa targetnya belum tercapai adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengawasan terhadap Pajak MBLB
2. Jumlah Wajib Pajak MBLB yang mempunyai izin hanya 4 Wajib Pajak
3. Rumitnya Proses Perizinan Tambang yang ada di Provisnsi
4. Pelaporan pajak yang (Self Asessment) sehingga membuat pelaporan pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya
5. Rendahnya Kesadaran Masyarakat (Pengusaha Tambang)
6. Sanksi yang belum tegas

Dilihat dari penjelasan diatas, maka perlu diperlukan Langkah-langkah strategis untuk memecahkan permasalahan penerimaan pajak terutama pada Pajak MBLB.

Dengan catatan walaupun semua jenis pajak yang lain targetnya sudah sesuai, akan tetapi masih diperlukan percepatan-percepatan untuk meningkatkan potensi dan penerimaan pajak daerah, sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Masyarakat utamanya Wajib Pajak
2. Monitoring, evaluasi, dan rekonsiliasi semua jenis pajak wajib dilaksanakan per bulan.
3. Optimalisasi Database Pajak Daerah
4. Perubahan Tata Kelola Pemungutan Pajak MBLB, dengan membuat Pos Pengawasan MBLB di 10 titik strategis yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.
5. Optimalisai sistem Pelayanan dan Pembayaran Pajak Daerah

6. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait, guna mencapai tujuan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar Periode Pelaksanaan 2025 Triwulan I disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Blitar

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Periode Pelaksanaan 2025

No	**Sasaran**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)**	**Taregt Renstra Perangkat Daerah pada Tahun .....(Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)**		**Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)**		**Target Kinerja dan ANggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) Yang dievaluasi**		**Realisasi Kinerja Pada Triwulan**						**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**
										I		**II**		**III**		**IV**						
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		**13=6 + 12**		**14 = 13/5 x 100%**		**15**
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	**Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	Rata-rata tingkat Capaian Kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10.310.731.573,00	85 %	75.766.218.790,00	85 %	11.145.443.783,00	10	1.152.201.806,00		0,00		0,00		0,00	40	2.833.011.728,00	62,5	78.599.230.518,00	62,5	25,42	Badan Pendapatan Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	4	15.000.000,00	4	0,00	4	0,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00	1	0,00	2,5	0,00	62,5		Badan Pendapatan Daerah

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	7.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0		Badan Pendapatan Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	7.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0		Badan Pendapatan Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel	10044	8.655.332.573,00	10044	20.215.351.825,00	10044	9.443.888.862,00	10037	967.129.796,00		0,00	00	0,00	00	0,00	10037	2.438.918.869,00	10037	22.654.270.694,00	92,05	25,83	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	8.422.697.573,00	44	18.857.211.018,00	44	9.012.039.256,00	37	887.413.574,00		0,00		0,00		0,00	36	2.353.610.647,00	36	21.210.821.665,00	81,82	26,12	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Administra	Jumlah Dokumen	44	232.635.000,00	44	1.358.140.807,00	44	431.849.606,00	37	79.716.222,00		0,00		0,00		0,00	36	85.308.222,00	36	1.443.449.029,00	81,82	19,75	Badan Pendapatan

		si Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		440.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Badan Pendapatan Daerah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44	440.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0	Badan Pendapatan Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12	546.849.000,00	12	1.874.938.893,00	12	577.453.500,00	3	49.875.340,00		0,00		0,00		0,00	3	172.819.335,00	3	2.047.758.228,00	25	29,93	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	12.500.000,00	5	52.288.900,00	5	17.000.000,00	1	4.235.500,00		0,00		0,00		0,00	1	8.474.500,00	1	60.763.400,00	20	49,85	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12	145.500.000,00	12	639.530.712,00	12	205.453.500,00	1	9.024.500,00		0,00		0,00		0,00	3	32.821.095,00	3	672.351.807,00	25	15,97	Badan Pendapatan Daerah

		Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan																				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	27.050.000,00	2	61.239.350,00	2	20.000.000,00	1	5.526.340,00		0,00		0,00		0,00	1	9.814.840,00	1	71.054.190,00	50	49,07	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	17.500.000,00	2	81.003.500,00	2	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	12.502.900,00	1	93.506.400,00	50	25,01	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	97.500.000,00	5	433.749.150,00	5	100.000.000,00	1	4.329.000,00		0,00		0,00		0,00	3	49.829.000,00	3	483.578.150,00	60	49,83	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	7.500.000,00	4	26.301.901,00	4	10.000.000,00	1	485.000,00		0,00		0,00		0,00	1	1.040.000,00	1	27.341.901,00	25	10,40	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	7.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0		Badan Pendapatan Daerah
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	231.799.000,00	8	580.825.380,00	8	175.000.000,00	2	26.275.000,00		0,00		0,00		0,00	4	58.337.000,00	12	639.162.380,00	150	33,34	Badan Pendapatan Daerah
		Pengadaan	Persentase	100	75.000.00	90	741.748.0	10	195.092.0	10	0,00		0,0		0,		0,00	10	0,00	95	741.748.000,00	95	0,00	Badan

		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran		0,00		00,00	0	00,00	0			0		00			0					Pendapatan Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	75.000.000,00	2	741.748.000,00	2	195.092.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	2	741.748.000,00	100	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	100	337.750.000,00	100	51.573.617.426,00	100	474.009.421,00	100	76.813.848,00		0,00		0,00	0,00	100	119.518.162,00	100	51.693.135.588,00	100	25,21	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	7.000.000,00	12	16.846.500,00	12	3.833.000,00	3	3.800.000,00		0,00		0,00	0,00	3	3.800.000,00	15	20.646.500,00	125	99,14	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	140.750.000,00	12	50.556.064.276,00	12	125.000.000,00	3	24.628.749,00		0,00		0,00	0,00	3	45.216.498,00	3	50.601.280.774,00	25	36,17	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	12	190.000.000,00	12	1.000.706.650,00	12	345.176.421,00	3	48.385.099,00		0,00		0,00	0,00	6	70.501.664,00	18	1.071.208.314,00	150	20,42	Badan Pendapatan

		Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																				Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100	240.800.000,00	100	1.360.562.646,00	100	455.000.000,00	100	58.382.822,00		0,00		0,00		0,00	100	101.755.362,00	100	1.462.318.008,00	100	22,36	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	100.800.000,00	12	556.507.284,00	9	180.000.000,00	3	39.942.022,00		0,00		0,00		0,00	1	57.765.762,00	1	614.273.046,00	8,33	32,09	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	65.000.000,00	5	234.836.200,00	5	75.000.000,00	2	18.440.800,00		0,00		0,00		0,00	1	36.935.600,00	1	271.771.800,00	20	49,25	Badan Pendapatan Daerah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	1	75.000.000,00	1	569.219.162,00	1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	7.054.000,00	1	576.273.162,00	100	3,53	Badan Pendapatan Daerah

		Lainnya	ehabilitasi																				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah	15%	8.975.900.000,00	5,16 %	35.761.486.783,00	9,56 %	15.518.721.416,00	2 %	284.381.140,00		0,00		0,00		0,00	17	2.978.450.347,00	11	38.739.937.130,00	73,33	19,19	Badan Pendapatan Daerah
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		100	8.975.900.000,00	100	35.761.486.783,00	100	15.518.721.416,00	100	284.381.140,00		0,00		0,00		0,00	100	2.978.450.347,00	100	38.739.937.130,00	100	19,19	Badan Pendapatan Daerah
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	150.000.000,00	2	23.420.000,00	2	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.420.000,00	0	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	300.000.000,00	2	2.470.514.833,00	2	481.070.000,00	1	5.637.540,00		0,00		0,00		0,00	1	14.924.540,00	3	2.485.439.373,00	150	3,10	Badan Pendapatan Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22	1.260.000.000,00	22	4.088.791.170,00	22	1.305.512.743,00	22	29.280.000,00		0,00		0,00		0,00	22	159.195.200,00	22	4.247.986.370,00	100	12,19	Badan Pendapatan Daerah
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan	2	116.400.000,00	2	2.828.040.595,00	2	1.348.458.400,00	1	64.550.000,00		0,00		0,00		0,00	2	463.370.000,00	4	3.291.410.595,00	200	34,36	Badan Pendapatan Daerah

		Pajak Daerah	Pajak Daerah																				
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	725.000.000,00	2	3.236.079.604,00	2	3.777.096.273,00	1	17.093.200,00		0,00		0,00		0,00	1	308.728.507,00	1	3.544.808.111,00	50	8,17	Badan Pendapatan Daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10	610.000.000,00	10	3.251.045.226,00	10	300.000.000,00	10	10.515.000,00		0,00		0,00		0,00	10	113.911.000,00	10	3.364.956.226,00	100	37,97	Badan Pendapatan Daerah
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5	250.000.000,00	5	782.554.760,00	5	90.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5	782.554.760,00	100	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	780200	625.000.000,00	780200	3.003.813.840,00	780200	90.240.000,00	780200	1.940.000,00		0,00		0,00		0,00	780200	1.940.000,00	780200	3.005.753.840,00	100	2,15	Badan Pendapatan Daerah

		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50	75.000.000,00	50	259.651.000,00	50	267.120.000,00	10	60.987.000,00		0,00		0,00		0,00	20	98.841.000,00	70	358.492.000,00	140	37,00	Badan Pendapatan Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100	75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0		Badan Pendapatan Daerah
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	780200	4.527.000.000,00	780200	13.511.550.063,00	780200	4.670.858.000,00	780200	69.126.000,00		0,00		0,00		0,00	780200	1.779.515.700,00	780200	15.291.065.763,00	100	38,10	Badan Pendapatan Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0		Badan Pendapatan Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	50	125.000.000,00	50	570.271.592,00	100	2.254.366.000,00	50	20.664.000,00		0,00		0,00		0,00	75	29.076.000,00	125	599.347.592,00	250	1,29	Badan Pendapatan Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	4	62.500.000,00	4	1.735.754.100,00	4	559.000.000,00	1	4.588.400,00		0,00		0,00		0,00	1	8.948.400,00	1	1.744.702.500,00	25	1,60	Badan Pendapatan Daerah

		Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah																				
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		0,00		0,00	4	275.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	Badan Pendapatan Daerah
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Predikat Kinerja																							
Faktor Pendorong Keberhasilan kinerja																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang perlu diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																							
Tindak lanjut yang perlu diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten /Kota berikutnya *):																							

Disusun
Blitar, Tanggal
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar

ASMANINGAYU DEWI L., S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

Dievaluasi
Blitar, Tanggal
Kepala BAPPEDA

Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mengelola anggaran yang tertuang dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 25.865.596.560,00 melalui dua program, delapan kegiatan dan tiga puluh lima sub kegiatan seperti yang terdapat pada table 3.1. Terkait dukungan terhadap penganggaran responsive gender, dipilih sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Keluaran
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan
5.02.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5.02.01.2.05	Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaaksanakan secara akuntabel
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatandanperlengkapankantor yang disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenisperalatan Rumah Tangga yang disediakan
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan yang disediakan
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Peneyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penggadaan barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainya yang disediakan
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penuunjnag Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik

	Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Capaian Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi

5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai Kondisi Rill
Kabupaten Blitar

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)	
		Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Keuangan				**25.865.596.560,00**				**27.158.876.388,00**
Program Penunjang UrusanPemerintahan DaerahKabupaten/Kota	**Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja pada Program**		**85%**	**11.165.778.984,00**			**85%**	**11.724.067.933,20**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan	Bapenda	-	**-**	APBD KAB		-	**-**
1 Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah	Bapenda	2 dokumen	-	APBD KAB		3 dokumen	-
2. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Laporan Capian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	2 dokumen	-	APBD KAB		3 dokumen	-
Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang akuntable	Bapenda	-	**9.605.149.351,00**	APBD KAB		100%	**10.018.718.218,00**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	44 orang	9.262.779.256,00	APBD KAB		44 orang	9.525.456.932,00
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	44 orang	342.370.095,00	APBD KAB		44 orang	493.261.286,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaaksanakan secara akuntable	Bapenda	-	**632.853.504,00**	APBD KAB			**588.119.778,00**
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlahkomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Bapenda	5 paket	17.000.000,00	APBD KAB		4 Paket	17.000.000,00
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatandanperlengkapankantor yang disediakan	Bapenda	12 paket	217.953.504,00	APBD KAB		12 Paket	216.119.778,00
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenisperalatan Rumah Tangga yang disediakan	Bapenda	2 paket	20.000.000,00	APBD KAB		4 Paket	20.000.000,00

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket logistik kantor yang dsediakan	Bapenda	2 paket	64.000.000,00	APBD KAB		4 Paket	50.000.000,00
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda	5 paket	106.900.000,00	APBD KAB		4 Paket	100.000.000,00
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Umlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Bapenda	4 dokumen	10.000.000,00	APBD KAB		6 Dokumen	10.000.000,00
7. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/Meterial yang disediakan	Bapenda	-	-	APBD KAB		-	-
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Peneyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda	8 laporan	197.000.000,00	APBD KAB		12 laporan	175.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penggadaan barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan daerah yang tepat Sasaran	Bapenda		**333.557.651,00**	APBD KAB		100%	**200.000.000,00**
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainya yang disediakan	Bapenda	2 unit	333.557.651,00	APBD KAB		3 unit	200.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bapenda		**636.404.421,00**	APBD KAB		100%	**462.229.938,00**
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Bapenda	12 laporan	5.333.000,00	APBD KAB		12 laporan	3.833.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	12 laporan	135.500.000,00	APBD KAB		12 laporan	127.500.000
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Peneyedian jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	Bapenda	12 laporan	495.571.421,00	APBD KAB		12 laporan	330.896.938
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah Penunjnag Urusan pemerintah Daerah dalam Kondisi baik	Bapenda	100 %	**527.000.000,00**	APBD KAB		100%	**455.000.000,00**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan Bayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	9 unit	193.500.000,00	APBD KAB		12 unit	180.000.000
2. Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah peralatan Mesin lainya yang dipelihara	Bapenda	5 unit	83.500.000,00	APBD KAB		7 unit	75.000.000
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara /direhabilitasi	Bapenda	1 unit	250.000.000,00	APBD KAB		1 unit	200.000.000
Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian	Bapenda	-	-	APBD KAB		100 Persen	-
1 Bimbingan Teknis Implemnetasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Bapenda	-	-	APBD KAB		44	-

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Peningkatan Penerimaan pajak Daerah**		**15% 100% 15%**	**14.130.631.633,00**			**15% 100% 15%**	**15.434.808.454,80**
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan Pajak daerah	Bapenda	100%	**14.130.631.633,00**	APBD KAB		100%	**15.434.808.454,80**
1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 dokumen	85.974.800,00	APBD KAB		2 Dokumen	99.459.279,16
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis pajak Daerah serta Pengembangan pajak daerah dan kebijakan Daerah	Bapenda	2 dokumen	307.659.900,00	APBD KAB		27 Dokumen	478.468.754,24
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	22 laporan	1.510.005.083,00	APBD KAB		32 Laporan	1.298.453.563,50
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 unit	1.389.628.400,00	APBD KAB		14 Unit	1.341.167.004,38
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaeran Objek Daerah, Subyek Pajak dan Wajib pajak daerah	Bapenda	2 laporan	3.317.621.950,00	APBD KAB		5286 Laporan	3.756.672.726,21
6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis data Pajak Daerah	Bapenda	10 laporan	264.002.000,00	APBD KAB		8 Laporan	298.377.837,47
7. Penilaian Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek Pajak yang disesuaikan NJOPNya	Bapenda	5 Objek Pajak	185.000.000,00	APBD KAB		25 Objek Pajak	89.513.351,24
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	45.120.000,00	APBD KAB		821700 Dokumen	89.752.053,51
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Junlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	50 layanan	180.000.000,00	APBD KAB		1600 layanan	265.675.626,49
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilian dan verifikasi	Bapenda	-	-	APBD KAB			-
11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	780.200 dokumen	4.477.850.000,00	APBD KAB		740.530 Dokumen	4.645.601.697,27
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelesaian Kebertan pajak Daerah	Bapenda	-	-	APBD KAB			-
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan pajak Daerah	Bapenda	100 dokumen	1.695.373.500,00	APBD KAB		495 Dokumen	2.242.176.173,17
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	4 laporan	397.396.000,00	APBD KAB		390 Laporan	555.977.370,49
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda	4 laporan	275.000.000,00	APBD KAB		5 Laporan	273.513.017,68

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 ini, bertujuan untuk mengevaluasi dan menentukan Langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Blitar dengan tetap tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar yang telah ditetapkan. Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah ini juga memerlukan keterlibatan semua pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten blitar ikut terakomodir dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap program kerja yang direncanakan. Dan hal-hal yang perlu digaris bawahi terkait pengoptimalan Penerimaan pendapatan antara lain:

1. Melaksanakan rekonsiliasi pajak secara rutin untuk mengurangi piutang pajak.
2. Melaksanakan *Role Sharing* dan *Cost Sharing* yang melibatkan Bapenda Provinsi sesuai SE Gubernur Jawa Timur Nomor: 900.1.13/26405/202/2024 Tentang Pelaksanaan Sinergi Pendanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak.
3. Memperbaiki basis data pajak yang lebih akurat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan konsultasi.
5. Optimalisasi seluruh jenis pajak daerah.
6. Optimalisasi Pelayanan dan Pembayaran baik Offline maupun Online.

Optimalisasi dalam implementasi Perubahan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sesuai

dengan kewenangan urusan Penerimaan Asli Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang belum optimal, Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang meliputi berbagai aspek teknis, administratif, maupun koordinasi antar pihak terkait, antara lain :

1. Melaksanakan perubahan tata kelola pemungutan Pajak MBLB yang baru, dengan dipasangnya Pos-pos pengawasan MBLB pada 10 titik strategis yang ada di Seluruh Kabupaten Blitar.
2. Melaksanakan SISMIOP, yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan PBB yang tertib administrasi, adil, efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pendapatan daerah.
3. Melaksanakan Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa, yang bertujuan untuk memutakhirkan data objek pajak secara akurat, memperluas basis pajak, meningkatkan potensi penerimaan PBB-P2, serta memperkuat peran perangkat desa/kelurahan dalam mendukung administrasi perpajakan daerah.
4. Menciptakan kolaborasi dengan *stakeholder* terkait melalui sinergi program dan kegiatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan piutang yang terus bertambah setiap tahun.
6. Melibatkan pihak ketiga dan aparatur wilayah untuk menyelesaikan masalah basis data pajak yang belum akurat dan valid.
7. Berkolaborasi Bersama dengan Bapenda Provinsi (Operasi Gabungan) untuk kegiatan Cost Sharing PKB dan BBNKB.
8. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan dan Pembayaran.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat tercapai. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Blitar, 15 Juli 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR

ASMANINGAYU DEWI L., S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19780426 200212 2 011